
PENYELENGGARAAN INDONESIA-CHILE COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IC-CEPA) DALAM MENDORONG POTENSI PERDAGANGAN DAN POSISI POLITIK INDONESIA DI *GLOBAL SOUTH*

Baptista Ezra Varani Nabit
6092201154@student.unpar.ac.id

Dirk Jotizto Delovedi
Josef Rangga Widyadharma
Hendrikus Nugroho Sidharta
Muhammad Akmal Rinaldi Putra

Universitas Katolik Parahyangan

Submitted 12 Juni 2025 Revision: 14 Juli 2025 Accepted: 8 Agustus 2025

Abstrak

Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) yang ditandatangani pada tahun 2019 merupakan perjanjian dagang formal pertama antara Indonesia dengan negara Amerika Latin yaitu Chile. Kerjasama bilateral ini bertujuan untuk memaksimalkan komoditas ekspor Indonesia dan juga mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional guna mendorong performa ekspor yang lebih bermutu, dan meningkatkan reputasi serta posisi tawar Indonesia di *Global South*. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik *Free Trade Agreement* untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri Indonesia menggunakan instrumen ekonomi, yang berorientasi pada kawasan ekonomi *Global South* yang lagi bertumbuh pesat. Kajian ini menggunakan metode kualitatif berbasis data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka atau pun dokumen tertulis. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah ***Economic Statecraft*** oleh David A. Baldwin (1985) dan Pendekatan ***South-South Cooperation***. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kerjasama perdagangan antara kedua negara berhasil berkontribusi terbukanya pasar ekspor Indonesia di kawasan Amerika Latin dan penguatan posisi tawar Indonesia di *Global South*.

Kata Kunci: *Economic Statecraft*, IC-CEPA, Diversifikasi, Ekspansi, *South-South*

LATAR BELAKANG

Dalam kajian hubungan internasional kontemporer, istilah *Global South* telah menjadi rujukan penting dalam memahami dinamika ketimpangan global, relasi kuasa, dan konfigurasi politik-ekonomi internasional yang diwariskan dari sejarah kolonialisme dan imperialisme. Konsep dari *Global South* tidak dapat dibatasi hanya pada dimensi geografis. Sebaliknya, konsep ini merepresentasikan konstruksi sosial-politik yang mencerminkan posisi negara-negara berkembang yang pada umumnya merupakan bekas koloni dalam menghadapi sistem dunia yang didominasi oleh negara-negara Barat (Lukman-nul Hakim, dkk., 2021: 3-4).

Kemunculan istilah *Global South* berkaitan erat dengan upaya kolektif negara-negara berkembang untuk menegosiasikan posisi mereka dalam tatanan global yang asimetris. Dalam hal ini, *Global South* menjadi simbol dari solidaritas transnasional, semangat perlawanan terhadap dominasi kapitalisme global, serta artikulasi aspirasi akan keadilan dan kedaulatan dalam pengelolaan urusan global (Lukman-nul Hakim, dkk., 2021: 5). Dalam konteks Indonesia dan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, konsep ini relevan untuk merefleksikan bagaimana warisan kolonial masih membentuk struktur ketimpangan ekonomi,

politik, dan kultural yang dihadapi hingga saat ini. Melalui pemahaman ini, studi mengenai *Global South* menawarkan kerangka kritis yang dapat memperkaya studi hubungan internasional dari perspektif yang lebih inklusif, reflektif, dan transformatif (Lukman-nul Hakim, dkk., 2021: 9–10).

Dalam konteks ekonomi, posisi Indonesia di *Global South* merefleksikan peran ganda sebagai negara berkembang yang menghadapi tantangan struktural dalam tatanan ekonomi global, sekaligus sebagai aktor strategis yang memiliki upaya untuk merekonstruksi peranannya melalui inisiatif kolektif negara-negara Selatan (Prabowo, 2021: 111-112). Penguatan posisi Indonesia di *Global South* dapat memberikan kesempatan yang lebar untuk mencapai kepentingan nasional. Indonesia memiliki kepentingan terutama dalam *South-South cooperation*, yakni untuk mewujudkan dan mendukung cita-cita Indonesia terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun struktur perekonomian yang semakin maju dan kokoh. Sejalan dengan kepentingan tersebut, Indonesia bercita-cita menjadi acuan pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan kesejahteraan masyarakat yang tinggi di ranah global. Selain itu, Indonesia juga ingin menjadi negara yang independen dan memiliki pengaruh yang besar terutama di kawasan

Asia-Pasifik. Guna mewujudkan cita-cita ini, posisi Indonesia dalam *Global South* sangat penting terutama untuk meningkatkan peluang pasar dan memperluas akses terhadap sumber daya serta konektivitas ekonomi regional maupun global. Demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonominya, Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama Selatan-Selatan untuk membuka peluang perdagangan dan investasi (Aknolt, Triwibowo, dan Apresian, 2025: 35). Hal ini juga dilakukan Indonesia agar diversifikasi pasar dapat dilakukan guna meminimalisir ketergantungan terhadap pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan China sekaligus membuka peluang untuk menembus pasar non-tradisional. Penguatan posisi Indonesia di *Global South* memberikan peluang untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia, mendorong kerjasama, dan meningkatkan kekuatan ekonomi domestik Indonesia (Aknolt, Triwibowo, dan Apresian, 2025: 39).

Penguatan posisi Indonesia di *Global South* tercermin dari kerja sama perdagangan *Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IC-CEPA) pada 2017. Melalui perjanjian ini, kedua negara bersepakat untuk menghapus tarif bea masuk atas sebagian besar produk yang diperdagangkan, sehingga mendorong peningkatan volume perdagangan bilateral

secara signifikan (Al-Husin, 2024: 458-463). IC-CEPA merupakan kesepakatan Perdagangan Bebas bilateral antara Indonesia dengan Chile yang diratifikasi pada tahun 2019 oleh kedua belah negara. IC-CEPA merupakan perjanjian perdagangan pertama Indonesia dengan negara dari Amerika Latin. Perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara Chile dan Indonesia dengan menurunkan tarif-tarif untuk beberapa komoditas yang sering diperdagangkan antara kedua negara. Komoditas yang tidak terkena pajak sama sekali dari Chile termasuk: Tembaga, gas batubara, minyak bumi, dan komoditas mineral hasil pertambangan lainnya. (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2019) Di tahun 2024, kementerian perdagangan Chile dan Indonesia mengekskansi kerjasama tersebut untuk meningkatkan investasi antar negara dan meningkatkan perdagangan di sektor-sektor selain pertambangan. Sektor-sektor lain yang dimaksud adalah pangan, pariwisata, perhotelan dan perumahan. Mantan wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan salah satu tujuan dari IC-CEPA dan ekspansinya adalah penetrasi pasar baru di Amerika Latin, dimulai dengan Chile. (Revanda and Shakira, 2024) Komoditas Indonesia yang tidak mendapatkan tarif di Chile termasuk tapi tidak terbatas pada: Kopi, teh, rerempahan, sawit, bahan

perkebunan lainnya; produk perikanan dari tiram sampai ikan Tuna; dan produk manufaktur seperti peralatan militer, produk kertas, dan alas kaki. Serangkaian alasan Indonesia memilih Chile untuk CEPA adalah posisi pelabuhan-pelabuhan Chile yang berjumlah banyak dan dapat menampung perpindahan barang dalam skala global. Akibat lokasi geografisnya juga, Chile menjadi tempat pemberhentian komoditas di Amerika Latin. (Free Trade Agreement Center, 2022:4-10) Perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kerja sama Selatan-Selatan antara negara yang sama-sama ingin melaksanakan perdagangan yang lebih adil dan merefleksikan keinginan kedua negara untuk berkembang. Perkembangan yang dimaksud merujuk pada perluasan pasar non-tradisional Indonesia.

Pasar non-tradisional dalam konteks perdagangan antar negara merupakan pasar atau negara yang memperdagangkan komoditas yang bukan ekspor utama dari negara pengekspor. Sebaliknya pasar tradisional merupakan negara-negara yang sudah lama menjadi target pasar. Secara spesifik, pasar tradisional merupakan negara-negara dengan relasi ekonomi yang kuat selama 40 tahun, konsumsi merupakan 50% dari PDB, dan ekspor hanya menghasilkan 5% dari PDB. Pada konteks Indonesia, dapat disebutkan juga bahwa pasar tradisional merupakan negara-negara

yang sudah memiliki relasi ekonomi yang tua dengan Indonesia, komoditas yang diperdagangkan merupakan ekspor utama Indonesia pada pasar global. Dari pengertian itu, pasar non-tradisional bagi Indonesia adalah negara-negara dengan prospek perdagangan yang besar, yang sebelumnya belum mendapatkan komoditas Indonesia. Komoditas yang diekspor juga tidak terpaku pada ekspor utama Indonesia seperti Sawit atau Migas (Aisyah and Renggani, 2021:3-4).

IC-CEPA, sebagai persetujuan antara Indonesia dan Chile merupakan jalur alternatif bagi Indonesia untuk menjelajahi pasar-pasar baru. Ekspor utama Indonesia secara tradisional merupakan batubara, sawit, dan migas. Industri di Indonesia harus melakukan untuk tetap tahan dalam perdagangan global, yang mengurangi ketergantungan terhadap pasar global untuk mendatangkan devisa negara, yang akan membolehkan ketahanan Indonesia dalam skenario krisis ekonomi global. Sejalan yang dikatakan oleh Hong (2021), negara-negara Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk mendiversifikasi industri dan ekspor dalam rangka mengurangi risiko eksternal akibat fluktuasi pasar global. Hong (2021) juga membicarakan salah satu koridor terbaik negara-negara dengan pendapatan menengah ke bawah seperti Indonesia untuk mengembangkan industri-industri non-tradisional adalah dengan

melakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Selatan. Dengan harga input yang lebih murah, Indonesia dapat memproduksi produk ekspor yang lebih murah juga, sehingga dengan mudah mengembangkan industri barang jadi di Indonesia. IC-CEPA merupakan upaya Indonesia dan Chile untuk memaksimalkan kegunaan koridor Selatan-Selatan untuk mendapatkan potensi perkembangan industri domestik paling besar. IC-CEPA merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mencoba mendiversifikasi ekspor Indonesia, dan akhirnya mendiversifikasi industri domestik dalam negeri. Walaupun salah satu komoditas yang dibebaskan dari tarif adalah sawit, tidak dapat dipungkiri bahwa bahan jadi lainnya seperti kertas, peralatan militer, dan alas kaki merupakan usaha dari Indonesia untuk melakukan penetrasi ke pasar yang sebelumnya tidak disentuh.

Beberapa kajian akademik telah dilakukan sebelumnya untuk meneliti tentang IC-CEPA sebagai kebijakan luar negeri di Indonesia di *Global South*. Salah satunya adalah penelitian oleh Musfiroh (2024) berjudul "*Indonesia's Motivations for Signing of the Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)*" yang mengkaji motif Indonesia untuk menandatangani perjanjian perdagangan dengan Chile terlepas dari catatan hubungan perdagangan kedua

negara yang tidak signifikan. Penulis berargumen bahwa IC-CEPA merupakan langkah kebijakan unik sehubungan dengan Chile sebagai mitra dagang di luar Asia yang pertama kali memasuki kerja sama perdagangan secara resmi dengan Indonesia. Sebelum IC-CEPA, Indonesia hanya mengajak kerja sama dengan negara-negara di Asia saja atau negara-negara mitra perdagangan utama saja. Bahkan di kawasan Amerika Latin pun, nilai perdagangan Chile dan Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan Brazil atau Argentina. Hasil penelitian Musfiroh (2024) menunjukkan penyelenggaraan IC-CEPA dari sisi Indonesia mengandung motif ekonomi dan motif politik. Secara ekonomi, Indonesia berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui perdagangan bebas dengan negara lain. Karakteristik impor Chile didominasi oleh barang konsumen yang mana menjadi jenis ekspor utama Indonesia. Kecocokan tersebut mendorong terjadinya perdagangan yang diperkuat dengan pemotongan tarif impor Chile melalui IC-CEPA. Secara politik, IC-CEPA menjadi instrumen Indonesia dalam meningkatkan status Indonesia sebagai trade-hub di kawasan Asia Tenggara. Salah satu syarat implisit bagi sebuah negara yang ingin menjadi *trade hub* dapat dilihat dari infrastruktur dan kebijakan ekonomi yang terbuka seperti *Free Trade Agreement*.

Dengan menjalin kerja sama bersama Chile melalui IC-CEPA sebagai bentuk FTA, hal ini dapat meningkatkan daya tawar Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Sehubungan dengan politik luar negeri, IC-CEPA menjadi instrumen kebijakan luar negeri yang dapat memberikan timbal balik ekonomi dan politik yang signifikan bagi Indonesia (Musfiroh, 2024).

Penelitian serupa dilakukan oleh Ita Rosita et al. (2024) dengan judul "*The Urgency and Strategy of IC-CEPA International Cooperation on the Economic Development of Indonesia*" mengkaji faktor-faktor yang mendorong kebijakan Indonesia untuk menandatangani IC-CEPA, dengan fokus utama pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor komoditas ke Chile yang diiringi dengan penguatan hubungan bilateral dengan negara Amerika Selatan. Berdasarkan fokus tersebut, para penulis berargumen bahwa IC-CEPA merupakan komponen esensial dalam menambah pemasukan negara dalam jangka panjang. Secara ekonomi, pemilihan Chile sebagai mitra strategis disebabkan oleh pemasukannya yang menengah tinggi dan relasi diplomatis yang baik antara kedua negara. Chile juga bertindak sebagai "gerbang" komoditas produk Indonesia ke negara-negara Amerika Selatan yang lain. Pertumbuhan perdagangan harus disertai dengan peningkatan produksi dan diversifikasi

komoditas dari Indonesia, agar memaksimalkan IC-CEPA sebagai kesempatan dan jalan meningkatkan ekspor dan mengembangkan ekonomi.

Dari penelitian yang telah dilakukan, para penulis memiliki satu kesepakatan terkait IC-CEPA sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia dalam mencapai kepentingan ekonomi dan politik dalam konteks penguatan posisi Indonesia di *Global South*. Meskipun aspek ekonomi dan politik telah ditelusuri lewat penelitian sebelumnya, masih terdapat elemen-elemen analitis lainnya yang perlu diteliti lebih lanjut dari IC-CEPA khususnya terkait posisi Indonesia di *Global South*. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis baru terkait IC-CEPA sebagai kebijakan luar negeri guna mencapai kepentingan diversifikasi ekspor pasar non-tradisional Indonesia di luar negeri serta perluasan pengaruh Indonesia di antara negara-negara *Global South*. Peneliti tulisan ini akan berfokus pada kepentingan ekonomi berupa ekspansi dan penetrasi barang-barang ekspor non-tradisional di pasar Chile sedangkan kepentingan non-ekonomi berupa penyebaran pengaruh guna memperoleh dukungan negara Selatan secara diplomatis serta maksimalisasi manfaat perdagangan internasional bagi ekonomi domestik Indonesia.

KERANGKA BERPIKIR

IC-CEPA dan *Economic Statecraft*

Seperti yang dijelaskan di atas, IC-CEPA merupakan perjanjian perdagangan yang antara Indonesia dan Chile yang diratifikasi pada tahun 2019 (Kementerian Energi dan Sumber Daya, 2019). Kerjasama yang terjalin diantara Indonesia dan Chile ini merupakan bentuk dari *Free Trade Agreement*. FTA mengacu pada pengurangan hambatan tarif dan non-tarif, yang menyebabkan produk-produk Indonesia memiliki harga yang kompetitif di pasar Chile. Pengurangan tarif komoditas Indonesia membuat harga produk-produk buatan Indonesia yang di jual di Chile memiliki harga yang lebih rendah, sehingga lebih menarik (Al-Husin and Virgianita, 2024).

Dalam kerangka berpikir *Economic Statecraft* oleh Baldwin (2020), sebuah negara dapat menjalin relasi ekonomi dengan negara lain dengan tujuan mencapai kebijakan luar negerinya. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dapat dikategorisasikan sebagai kebijakan sanksi positif, atau kebijakan sanksi negatif. Kebijakan sanksi positif merupakan kebijakan yang bertujuan menguntungkan negara-negara yang terlibat. Kebijakan sanksi negatif merupakan kebijakan yang bertujuan memberikan dampak negatif terhadap negara target dengan

mengganggu aktivitas ekonominya. *Free Trade Agreement* merupakan salah satu bentuk sanksi positif sebagai kebijakan diskriminatif yang menguntungkan kedua belah pihak.

Baldwin (1985) yang melihat ekonomi sebagai senjata paling efektif untuk mengubah perilaku aktor lain dalam konteks persaingan politik. Secara tradisional, *Statecraft* merupakan seni dalam menjalankan urusan negara yang mencakup dimensi kebijakan publik baik dalam maupun luar negeri untuk mewujudkan kepentingan nasional melalui manuver yang rasional dan strategis. Baldwin juga menekankan *Statecraft* dapat melibatkan penggunaan ekonomi, militer, informasi, dan diplomasi sebagai instrumen pengaruh yang dapat digunakan baik terpisah ataupun bersamaan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Selain itu, istilah *Statecraft* juga biasanya digunakan untuk mencakup seluruh proses pembuatan kebijakan luar negeri, dan merujuk pada cara suatu negara untuk mencapai tujuan dari kebijakan luar negeri itu sendiri. Menurut Harold dan Margaret Sprout, *Statecraft* adalah keahlian bernegara yang mencakup semua kegiatan guna melindungi nilai-nilai yang dipegang oleh suatu negara dan untuk mencapai tujuan atau kepentingannya terhadap negara lain dan atau organisasi internasional. Dari kedua definisi tersebut menggambarkan *Statecraft* sebagai upaya

pemerintah untuk mempengaruhi aktor lain dalam sistem internasional. Sprout dan Holsti juga menambahkan aktor non-negara selain organisasi internasional dan perubahan dalam keyakinan, sikap, dan atau kecenderungan untuk bertindak sebagai tambahan terhadap dampak dari pengaruh (perubahan sikap) yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara terhadap aktor lainnya (A. Baldwin and B. Kapstein, 2020: 6-7). Baldwin (2020) mengemukakan bahwa dalam mencapai tujuan dari kebijakan luar negeri, terdapat teknik-teknik *statecraft* yang menyediakan berbagai pilihan (*alternatives*) kepada pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Teknik tersebut muncul dalam instrumen berupa kebijakan luar negeri yang mencakup kategori ekonomi. *Economic techniques of statecraft* yang dikemukakan Baldwin merujuk usaha negara untuk mempengaruhi perilaku negara lain dengan utilisasi metode ekonomi khusus seperti embargo, sanksi ekonomi, dan bantuan (A. Baldwin and B. Kapstein, 2020: 10-13).

Dalam hubungannya dengan politik internasional, *economic statecraft* dapat dipandang sebagai tindakan politik sebab mengandung usaha mempengaruhi aktor lain (*influence attempts*). Menurut Baldwin (2020), *economic techniques of statecraft* tidak terlepas dari konsep kekuatan (*power*) yang mana negara mengerahkan kekuatan ekonominya demi mempengaruhi perilaku

aktor dalam politik internasional. Baldwin menyatakan bahwa kekuatan merupakan konsep berbasis relasi dan dapat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam relasi tersebut atau tidak selamanya bersifat *zero-sum game*, serta peran sanksi ekonomi positif dalam pengerahan kekuatan negara (A. Baldwin, 2020: 18-20). Maka dari itu, sangat penting untuk membedakan target (*domain*) dan tujuan upaya dari pengaruh (*scope*) yang dilakukan oleh negara. Perbedaan tersebut mengacu pada siapa yang akan dipengaruhi dan cara mempengaruhinya. Target dan tujuan memiliki variasi dalam jumlah dan kepentingan. Setiap upaya pengaruh yang diberikan oleh satu negara biasanya mengejar lebih dari satu tujuan (A. Baldwin and B. Kapstein, 2020: 15). Pada gambaran yang lebih luas, *economic statecraft* sebagai tindakan politik dalam artian *influence attempts* wajib mencakup 3 komponen utama yaitu jenis instrumen kebijakan, target (*domain*), dan jangkauan (*scope*) dari upaya pengaruh yang bersangkutan. Di sisi lain, *economic statecraft* berpacu pada cara-cara ekonomi digunakan daripada tujuan akhir, penggunaan jalur ekonomi untuk mencapai tujuan non-ekonomi, dan mengandung definisi ekonomi sehingga ada batasan yang jelas antara teknik ekonomi dan non-ekonomi (A. Baldwin dan B. Kapstein, 2020: 31;39).

Salah satu bentuk nyata dari *economic statecraft* adalah kehadiran sanksi ekonomi negatif dan sanksi ekonomi positif yang dikemukakan oleh Baldwin (1971). Sanksi ekonomi positif merujuk pada kebijakan perdagangan yang menguntungkan dua negara atau lebih sedangkan sanksi ekonomi negatif mencakup kebijakan hukuman untuk mengancam keberlangsungan ekonomi negara target guna mengubah atau menundukkan rezim dari negara target (Caruso, 2021: 2-3). Sanksi ekonomi positif dalam perdagangan mencakup diskriminasi tarif yang menguntungkan, pemotongan tarif, subsidi ekspor dan impor, pembayaran langsung, jaminan lisensi ekspor dan impor. Dalam konteks modal (*capital*), jenis sanksi tersebut muncul dalam bentuk bantuan pinjaman atau hibah, jaminan pemerintah terhadap investasi swasta asing, insentif modal terhadap ekspor dan impor, pajak yang menguntungkan pada investasi modal asing (A. Baldwin dan B. Kapstein, 2020: 41-43).

Pengenaan sanksi ekonomi positif berguna untuk menambah aliansi, memengaruhi tarif perdagangan dengan negara lain, dan memperoleh akses terhadap potensi ekonomi negara target. Aktivitas perdagangan bebas (*free trade*) dapat dikategorikan sebagai *economic statecraft* karena mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan akses pasar yang lebih

bervariasi. Hal ini tercermin dari pembentukan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947 yang mempromosikan tatanan ekonomi internasional berbasis perdagangan yang lebih bebas dan tidak diskriminatif melalui prinsip *most-favored-nation*. Kebijakan perdagangan yang menguntungkan seperti hambatan tarif dan diskriminasi perdagangan relatif rendah memungkinkan negara-negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya seperti terbukanya pasar ekspor Amerika Serikat, mendorong pemulihan ekonomi Jerman dan Jepang pasca Perang Dunia II, dan akses lebih luas terhadap bahan mentah (A. Baldwin dan B. Kapstein, 2020: 44-45). Pola perdagangan tersebut diatur oleh serangkaian aturan dan hukum dan dibuat oleh pemerintah dari negara berdaulat yang memberikan akses hukum serta politik bagi pembuat kebijakan untuk mempengaruhi jalur perdagangan. Terlepas dari teknik non-ekonomi yang secara samar digunakan, namun kebijakan perdagangan bebas memiliki peran penting dalam operasionalisasi *economic statecraft*.

Diversifikasi dalam konteks ekonomi bisa diartikan sebagai perluasan jangkauan kegiatan ekonomi di dalam suatu negara yang penting untuk mendorong ekonomi dan meningkat standar kehidupan masyarakat (Delechat et al., 2024). Jadi diversifikasi pasar bisa diartikan sebagai sesuatu yang fundamental bagi sebuah

negara untuk bisa menumbuhkan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini melibatkan perluasan aktivitas perdagangan ke pasar internasional baru, sehingga mengurangi ketergantungan pada mitra. Strategi ini penting, karena mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi ekonomi global dan mendorong stabilitas ekonomi (Carlos et al., 2024).

South-South Cooperation

South-South Cooperation atau Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) merupakan kerja sama antara dua atau lebih negara yang terletak di dunia bagian Selatan yang mencakup berbagai sektor. Dari budaya, ekonomi, pendidikan, pertahanan, sampai lingkungan. UNDP menyatakan bahwa KSS merupakan kerja sama transnasional yang melibatkan dua atau lebih negara berkembang demi meningkatkan kapasitas nasional salah satu atau kedua negara tersebut. Kerja sama dapat dilakukan bukan hanya oleh pemerintah nasional, namun dapat dilakukan oleh bisnis, pemerintah daerah, LSM, dan aktor non-negara lainnya. KSS dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk. Kerja sama bilateral, multilateral, kerja sama regional atau global, atau kerjasama triangular (UNCTAD, 2025:5-7) Menurut Mthembu (2021:5-6). Salah satu prinsip utama dari KSS merupakan peningkatan kemandirian negara-negara selatan. Salah satu caranya adalah dengan

meningkatkan perdagangan antar sesama negara selatan. Peningkatan perdagangan akan membuka jalan untuk investasi, pembangunan, dan akses teknologi. Altınbaş (2013:32-34) menyatakan bahwa kerja sama selatan-selatan, dalam bentuk apapun dapat saling menguntungkan dengan meningkatkan interdependensi. Dengan melakukan *fair trade* tidak dengan negara-negara Utara, tetapi dengan sesama negara Selatan yang berkembang, semua pihak yang terlibat akan mendapatkan akses terhadap pasar global, dan yang dapat membuka jalan untuk pembangunan dan investasi.

Sejak konsepsinya pada tahun 1955 dengan diadakan Konferensi Asia Afrika, KSS berubah-ubah seiring berkembangnya zaman dan perubahan situasi internasional. Pasca masa Perang Dingin, dinamika negara-negara Selatan di dunia berubah dengan hilangnya Blok Barat dan Blok Timur. Bersamaan dengan meningkatnya kapasitas produksi dan PDB negara-negara yang secara tradisional dianggap sebagai negara Selatan seperti Brazil, Cina, dan India, relasi dan kerjasama antar negara-negara selatan berubah dari membuat identitas yang netral sebagai negara pascakolonial, ke integrasi pada sistem tata kelola internasional atau membangun tata kelola yang baru. (Mawdsley, 2019) Kerja sama selatan pasca perang dingin dan naiknya Cina di panggung dunia pada tahun

2010 diwarnai dengan pola hubungan yang didasarkan pada kepentingan nasional dan narasi solidaritas negara dunia ketiga. Mawdsley (2019) menyebut periode ini sebagai masa kerjasama dengan penekanan yang lebih banyak pada aksi-aksi konkret dan pragmatis dibandingkan dengan narasi dan gestur simbolis. Perubahan haluan tersebut diperhatikan di Indonesia dengan kerjasama KSS yang konkret dan mengikuti kebutuhan domestik.

Winanti and Alvian (2019) berargumen bahwa KSS sudah tidak lagi dilakukan hanya berdasarkan solidaritas negara-negara Selatan dan perasaan situasi yang sama, namun juga berdasarkan kepentingan nasional dan ambisi negara-negara Selatan yang mulai terlihat seperti Cina, India, Brasil, dan Indonesia. Dalam konteks ini, KSS merupakan alat untuk menyebarkan ketergantungan dan pengaruh di negara-negara Selatan. Oleh karena itu, aksi-aksi KSS yang dilakukan oleh Indonesia dapat dilihat dalam lensa pragmatis dan pada akhirnya *self-serving*.

Indonesia merupakan salah satu anggota Konferensi Asia-Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada tahun 1955. KAA merupakan awal mulai perjalanan Indonesia dalam melaksanakan KSS, karena salah satu perjanjian KAA yaitu *Advancing Common Interests and Cooperation*. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa negara KAA akan

memajukan kepentingan dan koperasi bersama-sama. Contoh dari implementasi perjanjian ini adalah dari 2010 sampai 2014 saat Indonesia implementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada 2019 Indonesia membentuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebagai wujud nyata bahwa Indonesia akan menyediakan bantuan internasional ke negara-negara lain. Indonesia juga aktif melakukan KSS dalam bidang kemanusiaan, mereka memberi 12,9 ton bantuan yang berisi makanan, minuman, tenda, dll ke Fiji pada tahun 2020 setelah sebuah bencana alam. Indonesia juga memberi 100,000 vaksin COVID-19 kepada Nigeria pada tahun 2022 (Hutabarat, 2023).

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini didefinisikan sebagai penelitian yang naturalistik karena dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*), penggunaan data kualitatif, analisis induktif, dan lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode penelitian ini merujuk pada prinsip filsafat postpositivisme yang interpretif dan konstruktif yang mana interpretasi akan makna dari data menjadi kunci analisis penelitian (Sutopo, 2006, p.15-18). Jenis data yang digunakan adalah data deskriptif

dan numeratif (tidak diwajibkan) namun bersandar pada kemampuan peneliti dalam menginterpretasikan makna dibalik fakta dari data yang dikumpulkan (kualitatif bermakna) (Sutopo, 2006, p.9, p.23-25). Teknik analisis data yang akan digunakan adalah *content analysis* dengan pendekatan kualitatif. Teknik penelitian tersebut berfokus pada studi teks secara sistematis dan melibatkan proses reartikulasi data berdasarkan interpretasi peneliti (Krippendorff, 2013, p.23). Dalam pelaksanaan metode penelitian dan teknik penelitian di atas, maka teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui triangulasi. Teknik triangulasi merujuk pada pengumpulan dan analisis data secara multiperspektif agar mampu menguji validitas sebuah data dari berbagai sumber. Pengambilan sumber tersebut akan menambah kelengkapan informasi pada kesimpulan penelitian (Sutopo, 2006, p.92). Terkait pengambilan sumber data, penelitian ini akan mengambil teknik pengambilan data studi pustaka dengan merujuk pada pustaka yang memiliki elemen-elemen relevan dengan tujuan penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah data data sekunder yang mana sumber data tidak diberikan secara langsung kepada peneliti, namun diambil dari sumber pustaka lainnya. Jenis data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen yang dirilis oleh institusi

pemerintahan negara, laporan hasil perdagangan antara Chile dan Indonesia, artikel jurnal ilmiah, dan berita media massa, serta dokumen organisasi atau lembaga internasional terkait IC-CEPA.

HASIL ANALISIS

IC-CEPA sebagai Ekspansi Pasar Ekspor Non-Tradisional Indonesia

Free Trade telah menjadi instrumen yang populer bagi negara untuk mengejar kepentingan nasionalnya terutama dalam bidang ekonomi. Hal tersebut karena *Free Trade* menawarkan kemudahan akses terhadap pasar dan pengurangan hambatan. Trend ini pertama kali populer saat *General Agreements on Tariffs and Trade* didirikan pada 1948 dan *World Trade Organization* pada 1995 (Sabaruddin, S. and Marks, S. (2016). The Potential Political Economy Impact of the Proposed Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Indonesia. *Asian Journal of Latin American Studies*, 29(1), pp.83–108.). Indonesia juga menjadi negara yang memanfaatkan free trade dalam mencapai tujuan ekonominya, Salah satunya adalah melalui IC-CEPA yang merupakan perjanjian bilateral pertama diantara Indonesia dengan kawasan Amerika Latin atau secara khusus

dengan Chile. IC-CEPA ditandatangani pada 14 Desember 2017 dan diratifikasi pada 19 Februari 2019 (Kementerian Energi dan Sumber Daya, 2019). Tujuan dari Indonesia mendorong kerjasama ini dengan Chile adalah untuk mendiversifikasi dan membuka akses bagi pasarnya Indonesia untuk membuka peluang baru. Selain itu melalui *Free Trade* dengan Chile, Indonesia memiliki potensi untuk memperluas komoditas ekspornya, hal ini karena permintaan impor Chile sesuai dengan komoditas ekspor Indonesia. Beberapa komoditas seperti minyak hewani, minyak nabati, minyak sawit, minyak kelapa, lemak, dan lilin memiliki permintaan yang tinggi dari pasar Chile. Hal tersebut karena Chile memiliki sektor agroindustri yang sedang berkembang, yang menjadikan Chile sebagai pasar yang menjanjikan bagi produk komoditas Indonesia. Selain itu, pasar Chile juga membuka peluang bagi komoditas manufaktur Indonesia seperti, tekstil, barang elektronik, dan peralatan mesin. Produk-produk kimia Indonesia juga memiliki potensi ekspor yang besar karena kebutuhan Chile dari sektor pertanian, manufaktur, dan energinya. Dan karena adanya pengurangan hambatan tarif dan non-tarif, membuat produk-produk Indonesia memiliki harga yang kompetitif di pasar Chile (Al-Husin and Virgianita, 2024).

Dengan penghapusan tarif impor ini (tarif 0%) pada sejumlah komoditas Indonesia, tidak hanya meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Chile, tetapi juga membuka peluang bagi eksportir Indonesia untuk memasuki pasar Chile dengan lebih mudah karena tidak adanya hambatan. Selain dari terbukanya akses pasar, kerjasama ini juga mendiversifikasi pasar Indonesia dari mitra tradisionalnya. Hal tersebut dapat mengurangi risiko volatilitas ekonomi Indonesia. Karena selama ini Indonesia bergantung pada pasar yang dominan berada di Asia seperti, Jepang, China, dan Australia yang dimana dengan ketergantungan ini membuat komoditas Indonesia lebih rentan mengalami ancaman fluktuasi. Selain itu terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi pasar, seperti krisis ekonomi, perubahan kebijakan perdagangan, atau ketegangan geopolitik. Selain itu ketergantungan pada pasar tradisional ini juga akan sangat berdampak ketika adanya hambatan perdagangan seperti, kenaikan tarif, proteksionisme, dan pembatasan impor (Al-Husin and Virgianita, 2024). Maka dari itu dengan membuka akses terhadap pasar Chile, Indonesia membuka peluang baru untuk memaksimalkan komoditas ekspornya dan diversifikasi pasar agar tidak terlalu bergantung pada komoditas dan pasar tradisional yang juga merupakan langkah strategis untuk mengelola risiko ekonomi

dan geopolitik serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global yang dinamis.

Upaya Pengaruh (*Influence Attempts*) Melalui Jalur Perdagangan Ekonomi dengan Chile - Tujuan Non-Ekonomi

Indonesia dikenal dengan potensi ekonomi yang besar di antara negara-negara berkembang saat ini sehingga posisi Indonesia sangat diperhitungkan dalam tatanan ekonomi internasional. Populasi Indonesia yang besar dan usia produktif, sumber daya alam yang berlimpah, sektor manufaktur serta investasi mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini tercermin dari posisi Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan populasi terbesar keempat dunia dan daya beli ekonomi terbesar (World Bank, 2023). Perdagangan Indonesia juga patut dicatat akan potensinya yang ditunjukkan lewat surplus perdagangan yang terjadi selama 57 bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2020. Indonesia mencatat surplus ekspor sebesar \$3.45 miliar melebihi impor yang mana peningkatan \$1.45 miliar sejak bulan Januari 2024 (Shofa, 2025). Menimbang potensi perdagangan Indonesia, mitra

dagang negara menjadi elemen penting dalam menjamin pasar dan pengaruh Indonesia di panggung ekonomi global. Salah satu kawasan yang terus menunjukkan potensi tersebut adalah Amerika Latin dan Karibia. Darwati (2023) melaporkan pernyataan dari Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta Kamdani, bahwa perdagangan Indonesia dengan Amerika Latin dan Karibia mengalami kenaikan 8.9% dalam 5 tahun terakhir. Kemitraan dagang antara Indonesia dengan Latin Amerika dan Karibia mencetak \$13 miliar dengan catatan pasar ekspor Indonesia ke kawasan tersebut meningkat sebesar 16.4% (Erta Darwati and Rini, 2023). Kenaikkan nilai perdagangan tersebut menempatkan Latin Amerika sebagai salah satu mitra penting bagi perdagangan Indonesia di tengah maraknya agenda ekonomi *Global South*.

Pada kawasan Latin Amerika, Chile muncul sebagai salah satu negara yang diperhitungkan performa perdagangannya. Pada tahun 2021, Perdagangan Chile mencapai 11.7% melampaui keseluruhan performa perdagangan kawasan Amerika Latin dan Karibia. Pada tahun yang sama, ekspor Chile mencapai 28.0% sedangkan rata-rata ekspor global yang hanya mencetak 26.6%. Terdapat alasan di balik performa perdagangan Chile yang gencar tersebut adalah investasi asing langsung

(*Foreign Direct Investment*), jalur perdagangan yang strategis, dan *Free Trade Agreement* yang luas. Dalam satu dekade terakhir sampai 2022, FDI Chile bertumbuh dari \$81 juta ke \$700 juta serta menjalin FTA dengan 65 negara lebih. Di sisi lain, garis pantai yang panjang dan pusat transportasi yang menghubungkan Amerika Latin dan Asia. Kedua hal tersebut menyediakan jalur pelayaran yang lebih hemat waktu dibandingkan jalur Atlantik dan membuka jalur pengiriman barang lintas negara dengan negara Amerika Latin seperti Argentina dan Brazil (Fu, 2024). Chile telah membangun citra sebagai negara dengan iklim bisnis yang terbuka dan dinamis serta menjadi *safe haven* untuk investasi asing.

Menindaklanjuti potensi Indonesia dan Chile dalam sektor perdagangan, maka IC-CEPA menjadi jalur ekonomi yang tepat bagi Indonesia untuk memfasilitasi upaya pengaruh Indonesia di Chile dan Amerika Latin secara lebih luas. Chile sebagai negara yang strategis dan pasar terbukanya menjadikan IC-CEPA sebagai jalur masuk Indonesia ke kancah ekonomi *Global South* khususnya kawasan Amerika Latin. Menilik *Economic Statecraft* sebagai tindakan politik, IC-CEPA merupakan cara Indonesia untuk mencapai tujuan non-ekonomi Indonesia yaitu penyebaran pengaruh Indonesia di panggung politik internasional. IC-CEPA diyakini memfasilitasi ekspor dan

impor kedua negara secara dinamis yang dapat membawa keuntungan mutual bagi Indonesia dan Chile dengan membuka pasar baru bagi produk ekspor maupun impor kedua negara. Indonesia dapat mengeksport produk manufaktur ke pasar Chile dan negara Amerika Latin sekitarnya serta mendapatkan akses terhadap bahan mentah Chile seperti tembaga guna mendukung industri elektronik di Indonesia. Hal ini berdampak pada pengurangnya ketergantungan Indonesia terhadap pasar ekspor tradisional, peningkatan ekspor di kawasan Amerika Latin, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia (Ita Rosita et al., 2024). Potensi IC-CEPA tersebut berimplikasi terhadap ketergantungan mutual bagi Indonesia dan Chile melalui sanksi ekonomi positif yang tertuang dalam perjanjian antar kedua negara seperti investasi dan pemotongan tarif perdagangan. Dari perspektif politik, Indonesia menggunakan IC-CEPA sebagai kebijakan ekonomi di sektor perdagangan (*instrument*) untuk mempengaruhi Chile (*target*) dalam membuka pasarnya dan dukungan diplomatik (*scope*). Sebagai mitra dagang pertama Indonesia di kawasan Amerika Latin, Chile telah menunjukkan dukungan penuh terhadap keterlibatan Indonesia di berbagai kerja sama bilateral maupun multilateral. Upaya akses Indonesia untuk bergabung dalam *Organisation for Economic and Cooperation*

Development (OECD) dan *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) sangat didukung oleh Chile sebagai negara mitra strategis Indonesia dalam aksesl kedua blok ekonomi tersebut (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025).

IC-CEPA juga memperkuat citra Indonesia sebagai pusat perdagangan internasional layaknya Singapura. IC-CEPA sebagai jalur ekonomi mengirimkan sinyal kepada negara-negara di lingkup internasional bahwa Indonesia menyelenggarakan ekonomi terbuka dengan bersandar pada pada kerja sama ekonomi yang mana kedua hal tersebut identik dengan karakter *trade hub* di berbagai kawasan. IC-CEPA sebagai FTA membuka kerja sama ekonomi dengan Chile sebagai negara kecil namun memiliki performa ekonomi yang progresif yang memperkuat posisi Indonesia sebagai *trade hub* guna dan posisi tawar Indonesia dalam panggung politik internasional dengan negara-negara tetangga maupun di luar kawasan Asia Tenggara (Musfiroh, 2024: 24-26).

IC-CEPA juga menunjukkan bahwa *Global South* sebagai panggung politik yang terus berkembang dapat menjadi kawasan bagi negara-negara untuk memperoleh keuntungan secara mutual. Meskipun Indonesia memiliki ukuran ekonomi yang

lebih besar dibandingkan Chile, namun kedua negara dipandang dapat sebagai mitra ekonomi komplementer. Chile dan Indonesia sebagai dua negara dengan kekuatan sumber daya yang berlimpah dan berambisi memperluas jangkauan ekonominya. Kedua negara mendapatkan akses terhadap pasar baru, potensi kerja sama sama di bidang investasi, dan diversifikasi pasar ekspor di kawasan Asia dan Amerika Latin (Sanhueza, 2024). Penjelasan Baldwin perihal peran *statecraft* dalam politik internasional, IC-CEPA merupakan pembuktian bahwa negara-negara dapat memperoleh keuntungan dalam konteks politik internasional *Global South*. Indonesia juga berhasil mempengaruhi komitmen Chile dan negara Amerika Latin lainnya dalam memandang Indonesia sebagai mitra dagang strategis di kawasan Asia. Potensi industri dan investasi Indonesia telah banyak menarik negara-negara Amerika Latin lainnya. Sejak IC-CEPA ditandatangani tahun 2019, negara-negara Amerika Latin lainnya mulai melirik Indonesia yang ditunjukkan lewat negosiasi Indonesia dengan MERCOSUR, grup ekonomi berisikan Argentina, Brazil, Uruguay, dan Paraguay (Sterzer, 2022). Komitmen Chile dalam memperdalam IC-CEPA juga mulai terlihat dari negosiasi perluasan kerja sama di bidang investasi dan jasa. Tercatat bahwa investasi Indonesia dan Chile meningkat dari 160.7%

menjadi 280% di berbagai bidang mulai dari pariwisata hingga perumahan. IC-CEPA yang hanya bermula pada perdagangan barang (*goods*) sekarang merambah ke sektor jasa dan investasi membuktikan bahwa Indonesia sukses dalam mempengaruhi kepercayaan dan komitmen Chile untuk memperdalam kerja sama ekonomi dengan Indonesia (Cicilia, 2024). IC-CEPA sebagai *economic statecraft* berhasil menunjukkan bahwa jalur FTA dapat mendorong Indonesia untuk mencapai tujuan non-ekonomi seperti penguatan aliansi dengan negara Chile dan penguatan posisi tawar Indonesia dalam kontestasi politik *Global South*, serta citra Indonesia sebagai mitra dagang yang berpotensi di mata negara-negara berkembang.

Implikasi IC-CEPA bagi posisi Indonesia di *Global South*

Perjanjian *Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IC-CEPA) memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar ekspor ke Amerika Serikat melalui Chile sebagai pintu gerbang utama. Chile memiliki posisi geografis strategis di pantai barat Amerika Selatan dengan infrastruktur pelabuhan internasional pelabuhan internasional yang lengkap seperti San Antonio, Iquique, dan Valparaiso, yang memudahkan distribusi

produk Indonesia ke negara-negara tetangga seperti Bolivia, Paraguay, dan Peru. Dalam perjanjian ini, sebanyak 7.669 pos tarif produk Indonesia dihapuskan, dimana 6.704 produk langsung mendapatkan tarif 0% sejak IC-CEPA berlaku. Sementara itu, 965 pos tarif lainnya akan dibebaskan secara bertahap dalam enam tahun kedepan. Selain itu, fasilitas *Zona Franca de Iquique* (ZOFRI) memberikan kemudahan berupa penangguhan pembayaran pajak untuk ekspor ke negara ketiga, memperkuat posisi Chile sebagai *trade hub* di Amerika Selatan (Faliq & Marsanto, 2021: 175-176). Dengan demikian, IC-CEPA tidak hanya meningkatkan volume perdagangan bilateral tetapi juga mendorong diversifikasi komoditas ekspor Indonesia ke pasar Amerika Selatan yang lebih luas (Faliq & Marsanto, 2021: 178-179).

Selain memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar ekspor ke Amerika Serikat, kerjasama ini juga membuka ruang baru bagi peningkatan investasi serta penghapusan tarif yang dapat memperkuat posisi kompetitif produk Indonesia di pasar Chile dan negara sekitarnya. Berdasarkan hasil simulasi menggunakan model SMART, kebijakan penghapusan tarif bilateral ini diproyeksikan akan memberikan peningkatan surplus konsumen di Indonesia, khususnya pada sektor minuman dan tembakau, yang

banyak dipengaruhi oleh masuknya impor anggur segar dari Chile. Dampak negatifnya adalah penurunan signifikan dalam penerimaan tarif bea masuk, terutama dari kelompok barang seperti minuman, tembakau, makanan, dan hewan hidup (Sjahril & Marks, 2016: 91). Sementara itu, struktur ekspor Indonesia ke Chile menunjukkan diversifikasi yang cukup baik, dengan komoditas andalan seperti lemari pendingin, produk alas kaki, dan karet alam diperkirakan akan mendapatkan keuntungan dari tarif yang lebih rendah, meskipun rata-rata perubahan tarif tertimbang tidak terlalu besar (Sjahril & Marks, 2016: 94). IC-CEPA tidak hanya memperluas akses perdagangan melalui liberalisasi tarif, tetapi juga berperan sebagai pemicu investasi dan pertumbuhan sektor industri ekspor nasional. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing ekspor dan menekan ketergantungan terhadap impor (Sjahril & Marks, 2016: 100).

Dalam konteks non-ekonomis, perjanjian kemitraan ekonomi antara kedua negara ini, kerja sama antara Indonesia dan Chile melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IC-CEPA), tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang aktif dalam membangun jejaring ekonomi dan politik di antara negara-negara Global South.

Dengan menjalin hubungan bilateral yang lebih intensif dengan Chile, salah satu negara penting di Amerika Latin, Indonesia menunjukkan komitmen untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Global South yang selama ini kurang mendapat perhatian strategis (Sjahril & Marks, 2016: 98–99). Hal ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk memiliki blueprint kebijakan luar negeri dan diplomasi ekonomi yang lebih terarah terhadap kawasan Amerika Latin, sehingga dapat meningkatkan daya tawar dan kerjasama yang saling menguntungkan di tingkat global (Sjahril & Marks, 2016: 103). Melalui penguatan hubungan ini, Indonesia tidak hanya memperluas pasar ekspor dan investasi, tetapi juga memperkokoh posisi politiknya sebagai negara berkembang yang proaktif dalam membangun solidaritas dan kemitraan strategis di antara negara-negara berkembang di dunia. Dengan demikian, IC-CEPA menjadi instrumen penting dalam memperkuat peran Indonesia di kancah *Global South* (Sjahril & Marks, 2016: 100–101).

Diversifikasi mitra strategis melalui *Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IC-CEPA) mencerminkan upaya Indonesia untuk memperluas jaringan perdagangan dan diplomasi ekonominya di luar mitra tradisional, khususnya dengan negara-negara Amerika Latin. IC-CEPA yang mulai

berlaku pada Agustus 2019 ini merupakan perjanjian penting karena menjadi kesepakatan pertama Indonesia dengan negara di Amerika Latin, yaitu Chile (Sterzer & Pakkanna, 2020: 100). Melalui perjanjian ini, Chile menghapus tarif untuk 7.669 produk Indonesia, sementara Indonesia melakukan hal yang sama untuk 9.308 produk Chile, dengan penerapan penghapusan tarif secara bertahap. Selain itu, perjanjian ini juga mencakup aspek teknis seperti standar sanitasi dan fitosanitasi, hambatan teknis perdagangan, aturan asal barang, prosedur kepabeanan, serta kerja sama hukum dan teknis lainnya (Sterzer & Pakkanna, 2020: 100).

Bagi Indonesia, IC-CEPA merupakan bagian dari strategi untuk mencari pasar non-tradisional baru di Amerika Latin, yang saat ini menjadi fokus penting dalam kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia (Sterzer & Pakkanna, 2020: 88–89). Meskipun perdagangan bilateral antara Indonesia dan Chile masih relatif rendah dibandingkan potensi yang ada, IC-CEPA diharapkan dapat membalikkan tren penurunan ekspor Indonesia ke Chile yang terjadi sejak 2017 dan mendorong peningkatan perdagangan kedua negara (Sterzer & Pakkanna, 2020: 100). Keberadaan Attaché Pertanian Chile di Indonesia sejak 2015 juga memperkuat hubungan ini dengan memfasilitasi perdagangan dan identifikasi peluang bisnis

baru di sektor pertanian (Sterzer & Pakkanna, 2020: 100). Secara keseluruhan, IC-CEPA menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan mitra dagang tradisional di Asia dan negara-negara besar, tetapi juga aktif membangun hubungan strategis dengan negara-negara Amerika Latin, memperluas pengaruh dan jejaring diplomasi ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan (Sterzer & Pakkanna, 2020: 104).

South-South Cooperation

Indonesia merupakan negara dengan pendapatan menengah ke atas yang terletak di kawasan Asia Tenggara, dan berada di perbatasan Samudera Pasifik dan Hindia. Chile merupakan negara pendapatan tinggi di Amerika Selatan yang berbatasan dengan Bolivia, Peru, dan Argentina; sesama negara Amerika Selatan lainnya yang memiliki pendapatan menengah ke atas. (World Bank, 2024) Masa lalu Chile juga menunjukkan kesamaan dengan determinasi kemerdekaan dan sejarah perang dengan penjajah. Dalam kasus ini adalah Kerajaan Spanyol. (BBC, 2018) Chile sekarang merupakan negara demokratis dengan angka demokrasi elektoral, liberal, dan partisipasional di atas 0.70 dari 1, dan dikatakan sebagai Demokrasi Liberal. (Nord et al., 2025) Chile merupakan negara dengan klasifikasi pendapatan tinggi oleh

World Bank di 2023 di Amerika Selatan, negara yang memiliki sejarah revolusi dan penjajahan yang masih segar di pemikiran penduduknya, yang berakibat pada politik luar negeri condong ke kerja sama dengan sesama negara selatan (Cabecinhas and Alves, 2019). Chile memiliki aspirasi untuk meningkatkan pembangunan dan melakukan diversifikasi dengan mengekskansi pasar komoditasnya. Ditunjukkan bahwa terdapat adanya keperluan untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan pembangunan. *World Bank* (2024) mengeluarkan sebuah ringkasan lanskap ekonomi Chile di 2024, dan ditemukan bahwa pertumbuhan PDB menurun akibat kurangnya konsumsi pemerintah, investasi yang berkurang, dan fluktuasi harga hasil tambang mentah, yang mengurangi neraca ekspor Chile. Terutama akibat fluktuasi pasar, pemerintah Chile mendapatkan imperatif untuk semakin cepat membuka pasar-pasar baru untuk memasarkan produk hasil tambangnya. Indonesia dapat menjadi pasar baru tersebut. Indonesia juga memiliki sejarah kolonial yang sama, dimulai dengan Belanda yang masuk dan menjadi penjajah utama di Nusantara.(Ayu and Dwi, 2024) Selama masa kepemimpinan Jokowi, salah satu fokus dari administrasinya merupakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. (Ayudiana and Sulistiyandari, 2024) Salah satu cara untuk mendapatkan

pembangunan adalah dengan menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara Selatan seperti Chile. Berdasarkan fakta bahwa Chile merupakan negara yang memiliki ekspor utama bahan tambang mentah, dan kebanyakan perdagangan adalah dengan negara-negara di belahan dunia Barat, ekspansi pasar adalah salah satu hal yang diperlukan Chile. (Monteiro, 2023) Indonesia juga merupakan negara yang sedang mencoba untuk mendiversifikasi ekspornya ke pasar yang baru dengan komoditas yang baru. Sejarah mengatakan bahwa komoditas utama yang diekspor Indonesia merupakan Migas, namun fluktuasi harga global dapat menurunkan devisa negara akibat ketergantungan pada jenis komoditas tunggal. Indonesia dan Chile memiliki harapan untuk mengembangkan negaranya masing-masing dengan melakukan ekspansi pasar dan diversifikasi ekonomi.

Namun, relasi yang baik dengan Chile bukan berarti penutupan relasi dengan negara-negara Utara atau mitra dagang tradisional Indonesia. Indonesia memiliki relasi ekonomi yang kuat dengan negara-negara di luar dan di dalam ranah *Global South*. Indonesia dan Jepang masih memiliki hubungan dagang yang kuat. Indonesia mengimpor otomotif dan aksesoris jadi lainnya dari Jepang, dan mengekskpor batubara.(Observatory of Economic Complexity, 2023) Sejak 2008,

Indonesia dan Jepang sudah menandatangani perjanjian *Economic Partnership Agreement* yang menurunkan atau menghapus tarif ke 90% produk yang diperdagangkan antara kedua negara, dan sejak 2010 sampai 2020, nilai perdagangan naik sebesar 15%. (Medina, 2023) Indonesia juga memiliki relasi baik dengan negara maju lain di Asia Timur: Korea Selatan. IK-CEPA secara resmi diimplementasi di 2023 dan menghapus atau menurunkan tarif terhadap 90% atau lebih produk-produk yang diperdagangkan Indonesia dan Korsel. Kebanyakan komoditas yang diekspor Indonesia merupakan hasil industri perikanan dan batubara. Indonesia mengimpor barang-barang jadi seperti minyak bumi dan chipset (Medina, 2023). Bahkan di Eropa, Indonesia menandatangani perjanjian IE-CEPA dan EFTA, yang menghapus tarif ke 4 negara Eropa yaitu Swiss, Norwegia, Liechtenstein dan Islandia. Keempat negara ini mengimpor alat kaki dan tekstil dari Indonesia, sedangkan Indonesia mengimpor peralatan dan suplai obat-obatan. Di luar perjanjian-perjanjian ke negara-negara maju, Indonesia memiliki perjanjian dengan India, Cina, dan Pakistan baik secara mandiri atau sebagai salah satu anggota ASEAN (Medina, 2023).

Produk konsumen Indonesia seperti, makanan, baju, obat, dll sangat diminati oleh Chile. Ini bisa dilihat dari data impor

Chile terhadap produk konsumen Indonesia dinilai sebesar \$28 juta USD. Nilai impor Chile bisa sangat besar karena Indonesia sendiri ekspor produk konsumen mereka dengan nilai total \$66 juta USD, yang menjadi ekspor terbesar mereka terhadap Chile (Musfiroh, 2024). Tetapi menurut beberapa peneliti, ini tidak menutup fakta bahwa Chile dan Indonesia masih memfokus perdagangan terhadap negara-negara yang dianggap lebih stabil. Para peneliti tersebut masih menganggap bahwa relasi Indonesia dengan Chile masih terbatas. Tetapi ada beberapa peneliti yang masih melihat potensi perdagangan Indonesia dan Chile. Selain dari produk konsumen, produk hewani, sayuran, minyak, dan lilin, menjadi produk ekspor Indonesia yang sejalan dengan Impor Chile. Selain itu, potensi diplomasi ekonomi multi-level sangat besar juga untuk Indonesia dan Chile, karena budaya negara Latin yang suka, termasuk Chile, yang suka membuat perjanjian bilateral dan terlibat dalam forum multilateral dengan negara-negara di kawasan lain (Al-Husin and Virgianita, 2024).

Untuk mendukung IC-CEPA, Chile telah menghapus tariff sebesar 89.6% untuk produk-produk Indonesia yang masuk (Shofa, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya IC-CEPA, Indonesia mendapat keuntungan yang cukup besar untuk ekonominya, karena ekspornya yang

tidak terlalu dibebani oleh tarifnya Chile. Keuntungan tersebut bisa dilihat bahwa untuk keseluruhan 2023, perdagangan Indonesia dan Chile telah menghasilkan \$485.9 Juta USD (Shofa, 2024). Sebelum Indonesia dan Chile memiliki perjanjian dagang IC-CEPA, negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam sudah memiliki perjanjian dagang dengan Chile. Ketiga negara tersebut berhasil meningkatkan ekspor mereka ke pasar Amerika Latin, sedangkan Indonesia mendapatkan tarif dasar 6% untuk semua komoditas, dan mendapatkan tarif tambahan tergantung jenis produknya. Chile memiliki kebijakan *Most Favoured Nation* untuk memberikan perlakuan preferensial terhadap komoditas dari negara-negara tertentu. Chile sebagai sesama negara Selatan memiliki sejarah untuk memberikan perlakuan dagang khusus kepada sesama negara Selatan lainnya, oleh karena itu Indonesia memiliki motivasi untuk menjalin hubungan dagang yang kuat dengan negara Amerika Selatan. (Musfiroh, 2024) Data dari Kemenlu juga menunjukkan bahwa perdagangan setelah adanya IC-CEPA telah meningkat di periode 2019-2021, neraca perdagangan bilateral, atau catatan transaksi impor dan ekspor, meningkat sebesar 54% dari 275,8 juta USD menjadi 424,6 juta USD (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025). Salah satu penghambat dari relasi kedua negara

Selatan ini adalah kejauhan lokasi dari Indonesia dan Chile. Chile berada di Amerika Selatan, dan Indonesia berada di Asia Tenggara. Lokasi yang sangat jauh ini menghambat kerja sama lebih lanjut akibat harga transportasi yang mahal. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan salah satu penghambat yang terlepas dari regulasi Chile atau Indonesia dalam perdagangan (Al-Husin and Virgianita, 2024).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Melalui IC-CEPA Indonesia telah mencapai tujuan strategis ekonominya dalam melakukan diversifikasi produk manufaktur di pasar ekspor dan ekspansi ekspor bahan mentah di pasar Amerika Latin khususnya Chile. Penyelenggaraan IC-CEPA dapat dilihat sebagai implementasi *economic statecraft* Indonesia melalui cara-cara ekonomi dan utilisasi koridor *South-to-South Cooperation* dalam mencapai kebijakan luar negeri Indonesia di bidang ekonomi. Indonesia dapat membuka peluang baru di pasar Amerika Latin yang sebelumnya belum terjamah ekspor Indonesia, sehingga Indonesia dapat mengurangi resiko ketergantungan terhadap pasar dan komoditas tradisionalnya guna menghindari risiko fluktuasi pasar.

Dari sudut pandang *economic statecraft*, IC-CEPA mencerminkan cara atau teknik

ekonomi yang digunakan Indonesia guna mencapai tujuan ekonomi dan nonekonomi. Indonesia menggunakan instrumen FTA yaitu IC CEPA guna mendiversifikasi produk manufaktur dan memperluas pasar bagi bahan mentah Indonesia di pasar Chile dan lebih luas, kawasan Amerika Latin. Tujuan non ekonomi yang dicapai oleh Indonesia adalah penguatan aliansi Indonesia dengan Chile dan penguatan citra Indonesia sebagai mitra dagang strategis bagi negara-negara Amerika Latin yang berimplikasi pada posisi tawar ekonomi Indonesia di panggung politik *Global South*. Sejauh ini, penggunaan FTA IC-CEPA sebagai instrumen kebijakan ekonomi sukses menyebarluaskan pengaruh Indonesia di Chile dan kawasan Amerika Latin. Komitmen Chile yang semakin menguat terkait potensi IC-CEPA yang ditunjukkan oleh perluasan kerja sama di bidang investasi dan jasa, dukungan diplomatik Chile, dan semakin banyaknya negara Amerika Latin yang berkolaborasi dengan Indonesia, mengindikasikan pencapaian tujuan non-ekonomi Indonesia yang tertuang dalam IC-CEPA. Selain itu, kerja sama perdagangan IC-CEPA menunjukkan bahwa *Global South* dapat menjadi kawasan politik internasional yang dinamis dan membawa keuntungan bagi para pihak yang terlibat, alih-alih berujung pada *zero sum game* maupun *positive sum game*. IC-CEPA menjadi langkah awal Indonesia

untuk memperkuat eksistensi Indonesia sebagai trade hub center dan negara yang terbuka pada kolaborasi perdagangan.

Jika melihat dari pandangan *South-South Cooperation*, Relasi Indonesia dengan Chile telah menghasilkan relasi yang positif dan menguntungkan. IC-CEPA memberikan manfaat strategis bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Dari sisi ekonomi, perjanjian ini membuka akses pasar baru di Amerika Latin, memperluas peluang ekspor, dan menarik investasi melalui penghapusan tarif dan pemanfaatan pelabuhan serta zona perdagangan di Chile. Meskipun ada tantangan seperti penurunan penerimaan tarif impor, potensi pertumbuhan ekspor dan peningkatan daya saing produk Indonesia tetap besar. Sementara itu, dari sisi non-ekonomi, IC-CEPA dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang proaktif dalam membangun kerja sama dengan sesama negara *Global South*. Perjanjian ini memperlihatkan upaya Indonesia untuk memperluas jaringan diplomasi ekonomi di luar mitra tradisional, khususnya di kawasan Amerika Latin. Dengan demikian, IC-CEPA menjadi langkah penting dalam mendukung peranan Indonesia ke ranah global yang lebih seimbang dan inklusif.

Terlepas dari dampak positif yang muncul dari IC-CEPA, perlu diingat bahwa Indonesia masih memiliki jalan yang

panjang dalam membangun posisi ekonomi maupun politik ekonomi yang kuat di Global South. Ketergantungan Indonesia terhadap barang impor dan diversifikasi produk ekspor yang belum kuat mempengaruhi performa perdagangan Indonesia yang relatif tidak stabil. Oleh karena itu, penyelenggaraan FTA bersama negara lain seperti IC-CEPA, hubungan ekspor dan impor Indonesia bersama Chile perlu dimonitor agar tidak tercipta ketergantungan dari pihak Indonesia terhadap produk impor Chile serta menjamin manfaat mutual dalam perdagangan tersebut. Indonesia juga harus tetap mendorong diversifikasi dan produktivitas ekspor Indonesia dengan mendukung industri domestik, akses pasar ekspor yang mudah, dan insentif yang jelas bagi para pelaku industri. Selain itu,

Indonesia juga perlu berinvestasi dalam energi bersih guna menciptakan ketersediaan dan harga energi yang stabil agar mendukung investasi dari negara-negara mitra pada level domestik. Dalam konteks jasa dan investasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, kepastian hukum khususnya yang berkaitan dengan investasi, dan digitalisasi pada pelaku industri perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Republik Indonesia. Langkah-langkah tersebut disarankan agar mampu menciptakan iklim bisnis dan investasi yang sehat serta kemampuan tenaga kerja Indonesia yang sesuai standar internasional.

Daftar Pustaka

- A. Baldwin, D. and B. Kapstein, E. (2020). *Economic Statecraft: New Edition*. Princeton University Press.
- Aisyah, S. and Renggani, T.D. (2021). DETERMINANTS OF INDONESIA NON-OIL AND GAS EXPORTS TO NON-TRADITIONAL MARKET. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(3), pp.3–4. doi:<https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i3.3310>.
- Aknolt, A. and Pakpahan, K. (2025). © 2025 Papua Journal of Diplomacy and International Relations (PJDIR) - published by the International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Cenderawasih University, in collaboration with the Indonesian Association for International Relations (AIHII). *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 5, pp.33–49. doi:<https://doi.org/10.31957/pjdir.v5i1.4308>.
- Al Nafi, F.H. and Nurcahyo, M.A. (2021). ANALISIS SWOT PERJANJIAN PERDAGANGAN INDONESIA – CHILE CEPA. *BBM (Buletin Bisnis & Manajemen)*, 7(2), p.164. doi:<https://doi.org/10.47686/bbm.v7i2.414>.
- Al-Husin, R.N.A.-H. and Virgianita, A. (2024). Mapping the Literature on the Relationship between Indonesia and Chile as Non-Traditional Partners. *Journal La Sociale*, 5(2), pp.458–470. doi:<https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i2.1131>.
- Altinbaş, D. (2013). South–South Cooperation: A Counter-Hegemonic Movement? *The Rise of the Global South*, pp.29–65. doi:https://doi.org/10.1142/9789814397810_0002.
- Ayu, R.D. and Dwi, A. (2024). 20 Peristiwa Sejarah Indonesia, Sejak Era Penjajahan hingga Reformasi. [online] Tempo. Available at: <https://www.tempo.co/politik/20-peristiwa-sejarah-indonesia-sejak-era-penjajahan-hingga-reformasi-1177056> [Accessed 9 May 2025].
- Ayudiana, S. and Sulistiyandari, R. (2024). *Jokowi's legacy: Infrastructure gains amid regional challenges*. [online] Antara News. Available at: <https://en.antaranews.com/news/322571/jokowis-legacy-infrastructure-gains-amid-regional-challenges>.
- BBC (2018). Chile country profile. *BBC News*. [online] 12 Apr. Available at: <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19357497>.
- Breslin, S. and Nesadurai, H.E.S. (2023). Economic statecraft, Geoeconomics and Regional Political Economies. *The Pacific Review*, 36(5), p.928. doi:<https://doi.org/10.1080/09512748.2023.2200030>.
- Cabecinhas, R. and Alves, J. (2019). *Social Representations of History in the Global South: Remembering the colonial past from the margins*. [online] Available at: https://repositorium.uminho.pt/bitstream/1822/61833/1/2019_Cabecinhas_Brasil_Social-Representations-of-History-in-the-Global-South.pdf [Accessed 29 May 2025].
- Carlos, J., Arbulú-Ballesteros, M.A., Valle, M.G., Elizabeth, A., Edgardo, L., Farfán-Chilicaus, G.C., Daniel, H. and Ernesto, J. (2024). Diversification of Export Markets: A Literature Review. *Journal of Educational and Social Research*, [online] 14(5), pp.260–260.

- doi:<https://doi.org/10.36941/jesr-2024-0137>.
- Caruso, R. (2021). Economic Statecraft: from Negative Sanctions to Positive Sanctions. *Working Papers 1010 - European Centre of Peace Science, Integration and Cooperation (CESPIC), Catholic University 'Our Lady of Good Counsel*, [online] pp.2–3. Available at: <https://ideas.repec.org/p/pea/wpaper/1010.html> [Accessed 7 May 2025].
- Cicilia, M. (2024). *Indonesia dan Chile luncurkan Perundingan Investasi IC-CEPA*. [online] Antara News. Available at: <https://www.antaranews.com/berita/4150692/indonesia-dan-chile-luncurkan-perundingan-investasi-ic-cepa> [Accessed 9 May 2025].
- Delechat, C.C., Melina, G., Newiak, M., Papageorgiou, C. and Spatafora, N. (2024). Economic Diversification in Developing Countries – Lessons from Country Experiences with Broad-Based and Industrial Policies. *Departmental Papers*, 2024(006). doi:<https://doi.org/10.5089/9798400240201.087.A001>.
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2019). *Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Chile Disahkan*. [online] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Available at: <https://migas.esdm.go.id/post/kemitraan-ekonomi-indonesia-dan-chile-disahkan> [Accessed 5 May 2025].
- Erta Darwati and Rini, A.S. (2023). *Perdagangan RI-Amerika Latin dan Karibia Naik 8,9% dalam 5 Tahun Terakhir*. [online] Bisnis.com. Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231017/9/1704833/perdagangan-ri-amerika-latin-dan-karibia-naik-89-dalam-5-tahun-terakhir> [Accessed 8 May 2025].
- Free Trade Agreement Center (2022). *IC-CEPA Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement*. [online] Kementerian Perdagangan, pp.4–10. Available at: https://kemendag-my.sharepoint.com/personal/ftacenter_kemendag_go_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fftacenter_kemendag_go_id%2FDocuments%2FDokumen%20Perjanjian%20Perdagangan%20Internasional%2FIndonesia-Chile%20CEPA%2FFACTSHEET%20IC-CEPA%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fftacenter_kemendag_go_id%2FDocuments%2FDokumen%20Perjanjian%20Perdagangan%20Internasional%2FIndonesia-Chile%20CEPA&ga=1.
- Fu, N. (2024). *Latin America: Chile's Partnership Potential*. [online] Hktdc.com. Available at: <https://research.hktdc.com/en/article/MTYzODQ5NDQ4Nw>.
- Gray, K. and Gills, B.K. (2016). South–South cooperation and the rise of the Global South. *Third World Quarterly*, 37(4), pp.557–574. doi:<https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1128817>.
- Hong, P.M. (2021). *Singapore | The Importance of Export Diversification for Developing ASEAN Economies*. [online] Available at: https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/05/ISEAS_Perspective_2021_80.pdf.
- Hutabarat, L. (2023). *INDONESIAN DIPLOMACY OF SOUTH-SOUTH COOPERATION TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2030*. *Sociae Polites*, 23(2), pp.140–151. doi:<https://doi.org/10.33541/sp.v23i2.446>.
- Ita Rosita, Octazia Zauzah Rachmah, Achmad Jaelani, Muhyi Mohas and Amalina Ahmad Tajudin (2024). *THE URGENCY AND STRATEGY OF IC-CEPA INTERNATIONAL COOPERATION ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF INDONESIA*. *Tirtayasa Journal of International Law*, [online] 3(2),

- pp.146–148.
doi:<https://doi.org/10.51825/tjil.v3i2.23537>.
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA (2025). *Enam Dekade Menjalinkan Hubungan Diplomatik, Indonesia dan Chile Dorong Kerja Sama yang Lebih Intensif untuk Mendukung Pertumbuhan Perekonomian - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. [online] Available at: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6259/enam-dekade-menjalinkan-hubungan-diplomatik-indonesia-dan-chile-dorong-kerja-sama-yang-lebih-intensif-untuk-mendukung-pertumbuhan-perekonomian> [Accessed 9 May 2025].
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2025). *Portal Kemlu*. [online] Kemlu.go.id. Available at: <https://kemlu.go.id/kebijakan/kerja-sama-bilateral>.
- Kementrian Energi dan Sumber Daya (2019). *Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Chile Disahkan*. [online] Esdm.go.id. Available at: <https://migas.esdm.go.id/post/kemitraan-ekonomi-indonesia-dan-chile-disahkan>.
- Mawdsley, E. (2019). South–South Cooperation 3.0? Managing the consequences of success in the decade ahead. *Oxford Development Studies*, 47(3), pp.259–274. doi:<https://doi.org/10.1080/13600818.2019.1585792>.
- Medina, A.F. (2023). *An Overview of Indonesia's Free Trade Agreements*. [online] ASEAN Business News. Available at: <https://www.aseanbriefing.com/news/an-overview-of-indonesias-free-trade-agreements/>.
- Monteiro, T. (2023). *Chile: No Pain, No Gain*. [online] Global Finance Magazine. Available at: <https://gfmag.com/emerging-frontier-markets/chile-no-pain-no-gain/>.
- Mthembu, P. (2021). Restoring and Transforming Multilateralism: Role of South-South Cooperation. *RIS Journal Development Cooperation*, 4(2), pp.5–6.
- Muhr, T. (2022). Reclaiming the Politics of South-South Cooperation. *Globalizations*, 20(3), pp.10–14. doi:<https://doi.org/10.1080/14747731.2022.2082132>.
- Musfiroh (2024). Indonesia's Motivations for Signing of the Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA). *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, [online] 4(1). Available at: <https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/94079>.
- Nord, M., Altman, D., Angiolillo, F., Fernandes, T., God, A.G. and Lindberg, S.I. (2025). *25 Years of Autocratization – Democracy Trumped?* Gothenburg, Swedia: University of Gothenburg, pp.16, 52.
- Observatory of Economic Complexity (2023). *Japan (JPN) and Indonesia (IDN) Trade | OEC*. [online] OEC - The Observatory of Economic Complexity. Available at: <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/jpn/partner/idn>.
- Revanda, H. and Shaidra, A. (2024). *Indonesia Perluas Kerja Sama IC-CEPA dengan Cile, Jajaki Sektor Investasi*. [online] Tempo. Available at: <https://www.tempo.co/ekonomi/indonesia-perluas-kerja-sama-ic-cepa-dengan-cile-jajaki-sektor-investasi-49707> [Accessed 6 May 2025].
- Sabaruddin, S. and Marks, S. (2016). The Potential Political Economy Impact of the Proposed Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Indonesia. *Asian Journal of*

- Latin American Studies*, 29(1), pp.83–108.
- Sanhueza, C. (2024). *Chile and Indonesia: A growing and mutually beneficial relationship*. [online] The Jakarta Post. Available at: <https://www.thejakartapost.com/opinion/2024/06/19/chile-and-indonesia-a-growing-and-mutually-beneficial-relationship.html> [Accessed 9 May 2025].
- Saptoaji Prabowo, L.H. (2021). Indonesia's Self Identity in the Development Assistance Policy through South South and Triangular Cooperation (SSTC). *Global South Review*, 2(2), p.111. doi:<https://doi.org/10.22146/globalsouth.64156>.
- Shofa, J.N. (2024). *Indonesia Sends Trade Mission to Chile to Take Advantage of CEPA Deal*. [online] Jakarta Globe. Available at: <https://jakartaglobe.id/business/indonesia-sends-trade-mission-to-chile-to-take-advantage-of-cepa-deal> [Accessed 8 May 2025].
- Shofa, J.N. (2025). *Indonesia Retains Trade Surplus Run for 57th Consecutive Month*. [online] Jakarta Globe. Available at: <https://jakartaglobe.id/business/indonesia-retains-trade-surplus-run-for-57th-consecutive-month> [Accessed 8 May 2025].
- Sjahril abaruddin, S. and Marks, S. (2016). The Potential Political Economy Impact of the Proposed Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Indonesia. *Asian Journal of Latin American Studies*, 29(1), pp.83–108.
- Sterzer, S. (2022). *Indonesia's Economic Vision: Opportunities for Latin America*. [online] thediplomat.com. Available at: <https://thediplomat.com/2022/01/indonesias-economic-vision-opportunities-for-latin-america/>.
- Sterzer, S. and Pakkanna, A.K. (2020). Comparative Analysis of the Trade Relations of Argentina-Indonesia and Chile-Indonesia: *Latin American Journal of Trade Policy*, 3(8), p.87. doi:<https://doi.org/10.5354/0719-9368.2020.59042>.
- Tatjana Chahoud (2007). South-south cooperation - opportunities and challenges for international cooperation. *Econstor*.
- UNCTAD (2025). *Technical cooperation outcome Manual for the framework to measure South-South cooperation*. [online] Geneva, pp.5–7. Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/tcsstatinf2025d1_en.pdf [Accessed 6 May 2025].
- Winanti, P.S. and Alvian, R.A. (2019). Indonesia's South–South cooperation: when normative and material interests converged. *International Relations of the Asia-Pacific*, 21(2), pp.201–232. doi:<https://doi.org/10.1093/irap/lcz021>.
- World Bank (2023). *The World Bank in Indonesia*. [online] World Bank. Available at: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>.
- World Bank (2024). *The World Bank in Middle Income Countries*. [online] World Bank. Available at: <https://www.worldbank.org/en/country/mic/overview>.
- World Bank (2025). *The World Bank in Chile*. [online] World Bank. Available at: <https://www.worldbank.org/en/country/chile/overview>.

